

**TANTANGAN DAN PELUANG PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA STUDI DI BIRO TATA PEMERINTAHAN
SEKRETARIAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Fany Setyawan¹, Rumsari Hadi Sumarto²

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta^{1,2}

e-mail: setyawanfany766@gmail.com, rumsari.hadi@apmd.ac.id

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur strategis merupakan fondasi kemajuan bangsa dan kunci utama dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa proses pembangunan seringkali belum merata, menyisakan kesenjangan antarwilayah. Berangkat dari permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus untuk menganalisis secara mendalam dinamika dan problematika pembangunan di wilayah perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menguraikan fenomena secara naratif. Tahapan penting dalam penelitian ini adalah proses validasi data yang dilakukan secara ketat melalui uji kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, dan kepastian untuk menjamin keabsahan temuan. Hasil penelitian mengungkap beberapa fakta kunci: terdapat delapan tahapan dalam pembangunan wilayah perbatasan; masyarakat setempat menghadapi masalah yang kompleks dalam berbagai aspek kehidupan; dan isu peningkatan kesejahteraan masih menjadi prioritas strategis. Lebih lanjut, ditemukan bahwa penguatan ekonomi lokal menjadi sasaran utama program pembangunan, khususnya di sepanjang garis pantai selatan yang sangat membutuhkan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan mobilitas serta pertumbuhan wilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan strategi pembangunan perbatasan yang terpadu dan partisipatif, dengan fokus utama pada penguatan ekonomi lokal dan pemenuhan infrastruktur dasar sebagai solusi untuk mengatasi disparitas dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *pembangunan, perbatasan, masyarakat*

ABSTRACT

Strategic infrastructure development is the foundation of national progress and the main key in efforts to improve people's standard of living. However, the reality on the ground shows that the development process is often uneven, leaving gaps between regions. Departing from these problems, this study focuses on analyzing in depth the dynamics and problems of development in the border area between the Special Region of Yogyakarta (DIY) and Central Java. This study uses a descriptive qualitative method to describe the phenomenon narratively. An important stage in this study is the data validation process which is carried out strictly through credibility, transferability, dependency, and certainty tests to ensure the validity of the findings. The results of the study revealed several key facts: there are eight stages in the development of border areas; local communities face complex problems in various aspects of life; and the issue of improving welfare is still a strategic priority. Furthermore, it was found that strengthening the local economy is the main target of the development program, especially along the southern coastline which is in great need of basic infrastructure and economic empowerment to increase mobility and regional growth. This study concludes that an integrated and participatory border development strategy is needed, with a primary focus on strengthening the local economy and fulfilling basic infrastructure as a solution to overcome disparities and realize sustainable community welfare.

Keywords: *development, borders, society*

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan entitas penting yang tidak dapat diabaikan begitu saja dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan sebuah bangsa dapat dilihat dari sejauh mana pembangunan dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang sedang memegang kekuasaan (Akbar & Komarudin, 2018; Valentina & Elsera, 2023). Pembangunan infrastruktur strategis merupakan kebutuhan fundamental sebuah negara, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dari era pra sejahtera menuju sejahtera penuh. Peningkatan angka harapan hidup masyarakat tidak lepas dari campur tangan sesuatu yang sering disebut program. Cita-cita mulia tanpa diimbangi dengan program, ibarat memberi janji surga yang berisi pepesan kosong kepada masyarakat. Program pembangunan bisa dibuat dan berjalan apabila para *stakeholder* memiliki *political will* untuk mewujudkan perubahan bagi masyarakat (Nurdin, 2018; Susilo & Dharmawan, 2022).

Pembangunan wilayah perbatasan merupakan salah satu cara negara dalam melakukan pemerataan pembangunan dan mewujudkan keadilan ekonomi antara wilayah perkotaan dengan wilayah pinggiran, kesenjangan ekonomi dan infrastruktur harus dipangkas melalui pembangunan wilayah perbatasan dengan harapan angka harapan hidup dan taraf kehidupan masyarakat meningkat. Pembangunan wilayah perbatasan meliputi pembangunan infrastruktur penting karena menjadi kebutuhan orang banyak serta pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program padat karya yang menggunakan tenaga dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Pembangunan kawasan perbatasan diharapkan dapat meningkatkan perputaran roda ekonomi masyarakat serta meningkatkan nilai guna sumber daya lokal yang selama ini terabaikan atau belum tersentuh sama sekali oleh masyarakat (Cahyono & Indrayani, 2020; Herlina et al., 2020; Nurdin, 2018; Paramita et al., 2018).

Kewenangan pemerintah provinsi dalam konteks penataan ruang, khususnya wilayah perbatasan, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 22 ayat 2, huruf a sampai dengan huruf h yaitu *pertama*, perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi. *Kedua*, upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi. *Ketiga*, keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota. *Keempat*, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. *Kelima*, rencana pembangunan jangka panjang daerah. *Keenam*, rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan. *Ketujuh*, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan terakhir rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (Ramadhan & Mazhi, 2022).

Rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan, merupakan tugas dari pemerintah provinsi, sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 22 ayat 2, huruf f, membuat kawasan perbatasan kini naik kasta menjadi Kawasan Strategis Nasional dilihat dari berbagai multi perspektif yaitu sudut pandang pertahanan keamanan dan pendekatan kesejahteraan, menjadi strategi utama dalam pengembangan kawasan perbatasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demi melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pasal 22 ayat 2, huruf f, maka pemerintah daerah perlu membuat langkah-langkah kongkret, sebelum memulai proses pembangunan di Kapanewon-Kapanewon yang berbatasan dengan provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa pembangunan wilayah perbatasan diarahkan pada upaya meningkatkan pemberian pelayanan dasar serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan wilayah

perbatasan di DIY bertujuan untuk: 1) meningkatkan pelayanan dasar di wilayah perbatasan; 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan melalui koordinasi, fasilitasi, pembinaan, dan penyelarasan pembangunan; 3) meningkatkan keadilan penyelenggaraan pembangunan bagi masyarakat di wilayah perbatasan; 4) meningkatkan tertib administrasi perbatasan, mengembangkan sistem informasi manajemen perbatasan, serta pembuatan dan pemeliharaan penanda perbatasan; dan 5) meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja sama daerah dalam pengelolaan dan pembangunan di wilayah perbatasan.

Wilayah perbatasan DIY meliputi 18 (delapan belas) Kapanewon yang berada di sepanjang garis batas daerah DIY dengan Provinsi Jawa Tengah. Wilayah perbatasan tersebut merupakan salah satu lokus yang perlu diprioritaskan Pemerintah Daerah DIY untuk menciptakan kesetaraan pembangunan sekaligus mendorong terjadinya akselerasi pembangunan di kawasan tersebut. Pembangunan berbasis kawasan yang dilakukan secara komprehensif diperlukan guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah DIY terus berupaya memacu pembangunan wilayah perbatasan melalui pengoordinasian dan penyelarasan pembangunan.

Pertanyaan penelitian dalam paper ini adalah *pertama*, langkah-langkah apa saja yang harus dilalui, dalam proses pembangunan wilayah perbatasan. *Kedua*, masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. *Ketiga*, arah pembangunan prioritas yang dilakukan pemerintah di wilayah perbatasan. *Keempat*, program yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di wilayah perbatasan. *Kelima*, program yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan antar provinsi dan pantai Selatan. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan kondisi yang dialami oleh warga masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Atas dasar hal di atas, maka paper ini akan mulai membahas *pertama*, langkah-langkah yang harus ditempuh, dalam proses pembangunan wilayah perbatasan. *Kedua*, apa saja masalah yang dihadapi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. *Ketiga*, bagaimana arah pembangunan prioritas yang dilakukan pemerintah di wilayah perbatasan. *Keempat*, apa saja program yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di wilayah perbatasan. *Kelima*, apa saja program yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan antar provinsi dan pantai selatan. Konsep ini penting untuk diketahui oleh masyarakat luas, agar program pembangunan yang dilaksanakan, bisa mengurangi kesenjangan ekonomi antara masyarakat perkotaan dengan masyarakat pinggiran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami secara mendalam proses dan dinamika pembangunan wilayah perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan fokus pada peran Biro Tata Pemerintahan. Pendekatan ini dipilih untuk dapat menjelaskan fenomena secara holistik berdasarkan data naratif, bukan angka statistik. Subjek penelitian ditentukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan secara sengaja berdasarkan kapasitas dan relevansi mereka terhadap topik. Informan utama terdiri dari para pejabat di lingkungan Biro Tata Pemerintahan yang terlibat langsung dalam perumusan kebijakan, serta tokoh masyarakat yang berperan aktif dalam implementasi program pembangunan di wilayah perbatasan tersebut.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara komprehensif melalui tiga teknik utama untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam. Pertama, wawancara mendalam secara

Copyright (c) 2025 SOCIAL: Jurnal Inovasi Pendidikan IPS

tatap muka dilaksanakan dengan para informan kunci menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur untuk menggali perspektif dan pengalaman mereka. Kedua, observasi lapangan dilakukan secara langsung di beberapa lokasi di wilayah perbatasan untuk mengamati implementasi program pembangunan dan interaksi antar pemangku kepentingan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah berbagai laporan kegiatan, regulasi terkait, dan dokumen resmi lainnya untuk melengkapi serta memverifikasi data yang diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan.

Data yang terkumpul dari wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis secara kualitatif. Proses ini melibatkan tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan untuk menemukan pola serta makna dari fenomena yang diteliti. Untuk menjamin keabsahan dan keandalan temuan, dilakukan proses validasi data yang ketat. Teknik utama yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan melakukan kroscek informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan hasil observasi, dan isi dokumen resmi. Proses ini memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik konsisten, dapat dipercaya, dan didukung oleh berbagai bukti yang saling menguatkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil tentang pembangunan wilayah perbatasan dibagi menjadi lima bagian, sesuai dengan pertanyaan penelitian, pemaparan data diawali dengan temuan data sebagai berikut:

1. Data hasil penelitian

Tahapan pembangunan wilayah perbatasan merupakan proses penting dalam pembangunan wilayah perbatasan, pembangunan perbatasan akan dapat dilaksanakan dengan baik, jika masing-masing pihak mengetahui tugas pokok masing-masing. Pemaparan delapan tahapan yang harus dilalui dalam proses pembangunan wilayah perbatasan, akan penulis paparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Delapan tahapan pembangunan wilayah perbatasan

Uraian Tahapan
Pembentukan tim pembangunan wilayah perbatasan
Penyusunan peraturan teknis pembangunan wilayah perbatasan
Identifikasi permasalahan wilayah perbatasan
Penyusunan dan pemantapan arah kebijakan pembangunan wilayah perbatasan
Mengkoordinasikan dan menyelaraskan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
Advokasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan
Pelaporan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan
Peningkatan kolaborasi pembangunan wilayah perbatasan

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

Tabel 1 di atas menunjukkan ada delapan tahapan pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, setiap tahapan saling berkaitan dengan tahapan selanjutnya. Proses pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah dilaksanakan secara jelas dan terukur.

2. Permasalahan yang dihadapi oleh warga masyarakat di wilayah perbatasan

Tabel 2. Daftar Inventarisasi Masalah Wilayah Perbatasan

No	Nama Kabupaten	Uraian Masalah
1	Kulon Progo	Masih tingginya kasus malaria dan TBC Pelayanan kesehatan belum optimal Belum optimalnya akses dan kualitas pendidikan Akses terhadap air bersih masih rendah Masih banyak jalan yang rusak Penerangan jalan masih terbatas Masih banyak <i>blankspot</i> internet Kurangnya ketersediaan penanda batas di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Purworejo Rawan terjadinya tanah longsor Penanggulangan kemiskinan masih perlu ditingkatkan di Kapanewon Kokap dan Kapanewon Samigaluh
2	Gunungkidul	Belum optimalnya akses dan kualitas kesehatan Belum optimalnya akses dan kualitas Pendidikan Sarana dan prasarana pendidikan masih kurang Akses dan kualitas jalan masih belum optimal Penerangan jalan masih terbatas Akses terhadap air bersih masih kurang Akses transportasi umum masih kurang Rawan terjadinya tanah longsor Masih kurangnya ketersediaan tenaga pendidik Masih diperlukannya penegasan pilar batas Masih adanya <i>blankspot</i> internet Drainase masih kurang Penanggulangan kemiskinan masih perlu ditingkatkan terutama di Kapanewon Gedangsari dan Ponjong
3	Sleman	Akses pendidikan masih perlu ditingkatkan Akses air baku masih perlu ditingkatkan Akses dan kualitas infrastruktur jalan masih perlu ditingkatkan Ketersediaan dan kualitas irigasi masih perlu ditingkatkan Akses listrik masih perlu ditingkatkan Rawan bencana erupsi gunung merapi Bencana banjir Penanggulangan kemiskinan di Kapanewon Tempel dan di Kapanewon Prambanan

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

Dari pemaparan data pada tabel 2 menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan mengalami masalah yang kompleks di beberapa aspek dasar kehidupan.

3. Arah pembangunan prioritas

Tabel 3. Arah Pembangunan Prioritas

No	Nama Wilayah	Program
1	Perbatasan antar provinsi/pantai selatan	Pengentasan kemiskinan di wilayah perbatasan terutama pada 8 kapanewon yang menjadi lokus utama penanggulangan kemiskinan. Pemerataan infrastruktur dasar yang berkualitas Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Peningkatan keberdayaan masyarakat
2	Perbatasan kabupaten/kota	Pengentasan kemiskinan di wilayah perbatasan terutama pada kapanewon yang menjadi lokus utama penanggulangan kemiskinan. Akselerasi pembangunan infrastruktur Pengelolaan persampahan Mewujudkan kondusivitas wilayah Optimalisasi kualitas kesehatan masyarakat Penanganan dan pencemaran lingkungan Peningkatan keberdayaan masyarakat

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

Dari pemaparan tentang arah pembangunan wilayah perbatasan pada tabel 3 di atas, masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah.

4. Program peningkatan ekonomi

Tabel 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Kabupaten/Kota

No	Nama Kabupaten	Kapanewon	Program Kegiatan
1	Sleman		Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat
		Tempel	Stimulasi RTLH Akses air bersih, sanitasi dan listrik Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan pekarangan
		Prambanan	Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat Stimulasi RTLH Akses air bersih, sanitasi dan listrik Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal
2	Kulon Progo	Kokap	Hibah bansos tunai dan non tunai yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat Stimulasi RTLH Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal Mitigasi bencana

No	Nama Kabupaten	Kapanewon	Program Kegiatan
3	Gunungkidul	Samigaluh	Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat Akses air bersih Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal dan pemanfaatan lahan pekarangan Mitigasi bencana dan konservasi alam
		Gedangsari	Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat Stimulasi RTLH Akses air bersih, sanitasi dan listrik Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal Sosialisasi generasi berencana
		Ponjong	Hibah bansos tunai dan non tunai terutama lansia dan anak sekolah yang diiringi dengan edukasi Pemberdayaan bagi UMKM dan kelembagaan masyarakat Stimulasi RTLH Akses air bersih Pemenuhan gizi berbasis potensi lokal Sosialisasi generasi berencana

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

Dari pemaparan pada tabel 4 di atas, menunjukkan bahwa penguatan ekonomi lokal menjadi sasaran utama dalam program pembangunan perbatasan demi mewujudkan pemerataan ekonomi antara daerah perkotaan dengan daerah pinggiran.

5. Program pembangunan pantai selatan

Tabel 5. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Antar Provinsi dan Pantai Selatan

No	Lokasi	Program Kegiatan
1	Perbatasan Sleman - Gunungkidul	Pembangunan jalan dan jembatan Tawang-Ngalang Pembentukan kalurahan tangguh bencana dan pelatihan kebencanaan untuk masyarakat di desa Rongkop dan Giri Subo.
2	Perbatasan Kulon Progo - Magelang	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya pekerjaan BKK Desa Mandiri Budaya Peningkatan Kualitas RTLH Pelatihan dan pemberdayaan kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi

No	Lokasi	Program Kegiatan
		Pelatihan pengolahan makanan lokal, pemberian bantuan peralatan usaha kuliner frozen Pemberdayaan ekonomi perempuan, serta bimbingan teknis untuk industri kecil menengah Fasilitasi juru malaria desa

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, 2023

Dari pemaparan tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sepanjang garis pantai selatan membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal. Demi meningkatkan mobilitas penduduk dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah pesisir selatan.

Pembahasan

Penjabaran secara mendalam program Pembangunan perbatasan, untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu *pertama*, bagaimana tahapan yang harus dilalui dalam pembangunan wilayah perbatasan. *Kedua*, apa saja masalah yang dihadapi oleh warga masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. *Ketiga*, bagaimana arah pembangunan prioritas yang dilakukan pemerintah di wilayah perbatasan. *Keempat*, apa saja program yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi di wilayah perbatasan. *Kelima*, apa saja program yang disiapkan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan antar provinsi dan pantai selatan.

Jurnal ini ditulis berdasarkan hasil kajian mendalam penulis terhadap jurnal ilmiah tentang pembangunan wilayah perbatasan yang terbit pada edisi sebelumnya. Jurnal terdahulu yang terbit ialah *pertama*, jurnal yang berjudul pembangunan wilayah perbatasan negara, gambaran tentang strategi pengelolaan kawasan perbatasan darat di provinsi Kalimantan Utara. Jurnal tersebut memaparkan bahwa pembangunan wilayah perbatasan darat di Kalimantan Utara menjadi rencana penting yang dapat mendatangkan banyak manfaat untuk warga masyarakat dan Indonesia (Sudiar, 2015). Hasil penelitian di atas memandang perlunya pembangunan wilayah perbatasan terluar di Indonesia.

Kedua, jurnal yang berjudul makna pembangunan kawasan perbatasan Indonesia Filipina bagi masyarakat Miangas. Jurnal tersebut memaparkan bahwa masyarakat Miangas membutuhkan pembangunan disegala bidang agar kesejahteraan mereka menjadi lebih baik (Mamintada, 2017). Dari hasil riset di atas menunjukkan bahwa masyarakat yang tinggal diperbatasan membutuhkan inovasi kebijakan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Ketiga, jurnal yang berjudul pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. Jurnal tersebut memaparkan bahwa pembangunan wilayah di Indonesia belum menyentuh seluruh wilayah dan masih terdapat banyak masalah dilapangan (Budianta, 2010). Riset ini memandang bahwa pembangunan masih tersentralisasi di wilayah tertentu.

Jurnal yang ditulis oleh peneliti memiliki topik berbeda dengan ketiga jurnal di atas. Peneliti membahas tentang pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Penelitian ini dilaksanakan di Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara ketiga jurnal yang telah diulas sebelumnya, membahas pembangunan wilayah perbatasan antar negara. Pembangunan perbatasan antar negara, ruang lingkupnya jauh lebih luas daripada pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi.

Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah perbatasan sejalan dengan konsep yang dikemukakan oleh Riyadi dan Bratakusumah (2005) yang menjelaskan bahwa

pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Pemaparan di atas menekankan pentingnya perubahan kearah yang lebih baik dalam proses pembangunan wilayah.

Bahwa pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah, demi memperbaiki taraf hidup masyarakat. Kemudian yang perlu menjadi perhatian adalah meminimalisir kesenjangan wilayah seperti yang dikemukakan oleh Soetrisno (2018) dimana fokus utama pembangunan harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan penduduk lokal serta meminimalisir kesenjangan antara wilayah perbatasan dan pusat.

Tiga konsep di atas sangat berbeda dengan konsep yang dikemukakan (Djohani, 2003) mengenai pemberdayaan adalah suatu proses mentransfer kekuatan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, Transfer kekuatan ini dalam bentuk kewenangan atau ilmu pengetahuan sebagai landasan bagi pihak lemah untuk bisa hidup secara mandiri.

Saat ini, dalam memacu pembangunan wilayah perbatasan di DIY, telah ditetapkan instrumen kebijakan melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan. Di samping itu, telah terbentuk tim pembangunan wilayah perbatasan yang terdiri dari unsur perangkat daerah Pemerintah Daerah DIY dan Kabupaten melalui Keputusan Gubernur DIY Nomor 107/TIM/2023 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Wilayah Perbatasan. Namun perlu dipastikan terkait operasional serta implementasinya secara terarah dan berkesinambungan.

Langkah penting yang perlu ditempuh oleh Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten untuk mengoptimalkan pembangunan di wilayah perbatasan yaitu memasukkan wilayah perbatasan sebagai salah satu prioritas dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini diperlukan supaya program dan kegiatan perangkat daerah Pemerintah Daerah DIY dan kabupaten dapat lebih optimal menjangkau wilayah perbatasan. Tanpa ada intervensi dari pemerintah, sulit untuk mengungkit secara signifikan kemajuan di wilayah perbatasan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan di atas, penulis mengambil 5 (lima) kesimpulan yaitu, *pertama*, terdapat delapan tahapan pembangunan wilayah perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. *Kedua*, masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan mengalami masalah yang kompleks di beberapa aspek dasar kehidupan seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. *Ketiga*, masalah peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi isu strategis yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah. *Keempat*, penguatan ekonomi lokal menjadi sasaran utama dalam program pembangunan perbatasan. *Kelima*, wilayah pantai selatan membutuhkan pembangunan infrastruktur dasar dan pemberdayaan ekonomi lokal. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020, merupakan satu-satunya produk hukum daerah/regulasi di Indonesia, yang mengatur secara khusus pembangunan wilayah perbatasan antar provinsi, sehingga menjadikannya sebagai model bagi pemerintah daerah lain di Indonesia, untuk lebih memperhatikan kawasan perbatasan yang dimiliki oleh masing-masing pemerintah daerah

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, R. R. A., & Komarudin, K. (2018). Pengembangan video pembelajaran matematika berbantuan media sosial Instagram sebagai alternatif pembelajaran. *Desimal: Jurnal Matematika*, 1(2), 209. <https://doi.org/10.24042/djm.v1i2.2343>
- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. 8(1), 72–82.

- Cahyono, A. E., & Indrayani, L. (2020). Strategy of developing local economy based on regional superior commodities. *International Journal of Economics and Finance*, 12(7), 11. <https://doi.org/10.5539/ijef.v12n7p11>
- Djohani, R. (2003). *Partisipasi, pemberdayaan dan demokrasi komunitas*. Studio Driya Media.
- Herlina, H., et al. (2020). The development of community-based ecotourism in border area of Sambas Regency. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 14(3), 482. <https://doi.org/10.24843/soca.2020.v14.i03.p10>
- Mamintada, J. E. (2017). Makna pembangunan kawasan perbatasan Indonesia Filipina bagi masyarakat Miangas. *Jurnal Ilmiah Society*, 10(20).
- Nurdin, A. H. M. (2018). Integrasi sistem perencanaan partisipatif, teknokratif, dan politis dalam perencanaan dan penganggaran program pemberdayaan ekonomi masyarakat kota. *Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 4(1). <http://ejournal.ipdn.ac.id/index.php/JMP/article/view/190>
- Paramita, M., et al. (2018). Peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya lokal. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 19. <https://doi.org/10.30997/qh.v4i1.1186>
- Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembangunan Wilayah Perbatasan di Daerah Istimewa Yogyakarta. (2020).
- Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pengoordinasian dan Penyelarasan Pembangunan Wilayah Perbatasan. (2023).
- Ramadhan, A., & Mazhi, K. Z. (2022). Kajian daya dukung lahan perkotaan dalam rangka optimalisasi penataan ruang Kota Bandung. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 6(3), 212. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2022.6.3.212-232>
- Riyadi, & Bratakusumah, D. S. (2005). *Perencanaan pembangunan daerah*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Soetrisno, B. (2018). *Perbatasan dan pembangunan daerah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sudiar, S. (2015). Pembangunan wilayah perbatasan negara, gambaran tentang strategi pengelolaan kawasan perbatasan darat di Provinsi Kalimantan Utara. 3(4).
- Susilo, R. K. D., & Dharmawan, A. S. (2022). PAR practice for the development of applied sociology in Indonesia. In *Proceedings of the 1st International Conference on Social, Applied Science, and Technology in Home Economics (ICONHOMECES 2021)*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220302.025>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. (2007).
- Valentina, A., & Elsera, M. (2023). Analisis ketahanan sosial masyarakat “Nusantara” dalam pembangunan ibukota negara. *Jurnal Sosiologi Andalas*, 9(1), 39. <https://doi.org/10.25077/jsa.9.1.37-50.2023>